

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.383, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pangan dan Gizi.
Kewaspadaan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan monitoring situasi pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penanganan kerawanan pangan diperlukan suatu sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi secara rutin;
 - c. bahwa atas dasar tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden No. 84 P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI.

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disebut Pedoman SKPG, merupakan pedoman sistem monitoring yang meliputi serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
4. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kegiatan sistem monitoring SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan, analisis situasi pangan dan gizi tahunan serta penyebaran informasi SKPG.
- (2) Pedoman SKPG sebagaimana pasal 1, ayat 1, terdiri dari:
 - a. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Pusat, seperti pada lampiran 1;
 - b. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, seperti pada lampiran 2;
 - c. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota, seperti pada lampiran 3.

INDIKATOR

Pasal 3

- 1) Pedoman SKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat 1, dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana SKPG di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan data dan informasi yang terkait dengan:
 - a. indikator ketersediaan pangan;
 - b. indikator akses pangan;
 - c. indikator pemanfaatan pangan;sebagai dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
- 2) Hasil SKPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar pelaksanaan:

- a. investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- b. intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- 2) Tugas umum Pokja Pangan dan Gizi yaitu :
 - (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - (2) menggalang kerja sama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
- 3) Secara khusus tugas Pokja Pangan dan Gizi adalah:
 - (1) melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan SKPG dan informasi relevan lainnya;
 - (2) menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan SKPG;
 - (3) menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
 - (4) melaporkan hasil analisa tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - (5) melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

PELAPORAN

Pasal 5

- 1) Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
 - b. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi provinsi dan kabupaten/kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya;

- c. Pokja Pangan dan Gizi kabupaten/kota dilaporkan ke unit kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tingkat provinsi;
- d. Laporan SKPG kabupaten/kota menjadi dasar untuk menyusun informasi tentang situasi pangan dan gizi di tingkat provinsi oleh Unit Kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan selanjutnya dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan peraturan ini, peraturan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA, / KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 1. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT PUSAT

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2010**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Keluaran
- d. Ruang Lingkup
- e. Definisi

II. KONSEP KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN

- a. Ketahanan Pangan
- b. Kerawanan Pangan dan Gizi

III. PELAKSANAAN

1. Data yang Dikumpulkan
2. Pengolahan dan Analisis Data
3. Pelaporan

IV. PENGORGANISASIAN

V. PENUTUP

DAFTAR TABEL

1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan
2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan
3. Analisis Ketersediaan Bulanan
4. Analisis Akses Pangan Bulanan
5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan
6. Indikator Komposit Ketersediaan Bulanan
7. Indikator Komposit Akses Pangan
8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan Bulanan
9. Keterangan Warna Komposit Bulanan
10. Analisis Komposit Bulanan
11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan
12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan
13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan
14. Analisis Komposit Tahunan

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi mulai dilaksanakan pada tahun 1979, setelah melalui Pengembangan SKPG yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *Cornell University* Amerika Serikat. Pengembangan SKPG dimulai di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Penerapan SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban: (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di wilayah provinsi. Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut perlunya pedoman Pengelolaan SKPG dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

Pedoman ini memuat penjelasan pelaksanaan dan penerapan SKPG di tingkat Pusat. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparat pusat dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator

Ketersediaan Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Akses Pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu daerah serta dalam rangka melakukan investigasi dan intervensi.

c. Keluaran

- 1) Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.
- 2) Tersedianya informasi hasil investigasi daerah yang diindikasikan rawan pangan.
- 3) Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi.
- 4) Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan SKPG terdiri dari Konsep dan Definisi, Tugas-tugas Pusat dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (*indepth investigation*) bagi wilayah yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi.

e. Definisi

- 1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
- 2) Ketahanan pangan (UU NO.7 Tahun 1996) adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- 3) Isyarat dini adalah serangkaian kegiatan pemberian isyarat/informasi sesegera mungkin kepada masyarakat dan stakeholder lainnya tentang kemungkinan terjadinya sesuatu pada suatu tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang.
- 4) Intervensi adalah upaya membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan minimum.
- 5) Intervensi dapat dikategorikan menurut cakupan kelompok sasaran yaitu

pendekatan mikro (pelayanan atau bantuan langsung berdasarkan penanganan individual); mezzo (pelayanan atau bantuan bagi keluarga dan kelompok kecil) dan makro (mengupayakan perbaikan dan perubahan tata kehidupan masyarakat). Berdasarkan waktu pelaksanaan maka intervensi dapat dibedakan menjadi intervensi jangka pendek, intervensi jangka menengah, dan intervensi jangka panjang.

- 6) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
- 7) Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 8) Kerawanan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.
- 9) Kelaparan adalah kelaparan adalah ketidak mampuan seseorang memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif, karena masalah daya beli dan/atau ketersediaan pangan, serta nilai-nilai di masyarakat. Dalam pengertian lain, seseorang dikatakan lapar apabila dalam dua bulan terakhir terjadi penurunan frekuensi dan/atau porsi konsumsi pangan disertai penurunan berat badan karena alasan daya beli atau ketersediaan pangan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, dilanjutkan dengan kriteria berikut berat badan berdasarkan pengamatan tergolong kurus/sangat kurus karena alasan kurang makan/tidak mampu membeli makanan.
- 10) Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- 11) Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia

(penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

- 12) Indikator adalah suatu keadaan yang dapat memberikan petunjuk tentang terjadinya perubahan status pangan dan gizi penduduk.
- 13) Luas tanam adalah luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.
- 14) Luas puso adalah luas tanaman yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), DPI (Dampak Perubahan Iklim) dan/atau oleh sebab lainnya (gempa bumi, dll) sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11 persen dari keadaan normal.
- 15) Luas panen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya paling sedikit 11 persen dari keadaan normal. Khusus untuk jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah yang bertujuan menghasilkan pipilan kering (jagung) dan biji kering (kedelai).
- 16) Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidomologis pada suatu daerah dalam waktu tertentu (Peraturan Menkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004).
- 17) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10/1992). Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan transportasi.

BAB II

KONSEP KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN

a. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan terjemahan dari *food security*. Ketahanan pangan mencakup aspek yang luas dan kompleks, sehingga setiap orang mencoba menerjemahkannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat itu, serta sesuai dengan kedalaman pemahamannya. Ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara, sehingga pemakaian istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan perdebatan. Sejak istilah ketahanan pangan mulai diperkenalkan, pengertian ketahanan pangan terus berkembang sesuai dengan keadaan perkembangan permasalahan.

Pada tahun 1950-1960an, ketika Perang Dunia II baru usai, pangan tentu menjadi pemikiran setiap negara dan bangsa, baik negara-negara maju maupun yang baru saja merdeka dan yang kalah perang, termasuk Indonesia. Motivasi dan latar belakang pengelolaan pangan tentu saja berbeda antar berbagai negara tersebut. Negara-negara yang baru merdeka memang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya yang baru saja lepas dari penindasan kolonial, sedangkan negara-negara maju mungkin memiliki agenda yang berbeda.

Keterbatasan pemahaman ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat nasional dan global seperti diatas mendapatkan pencerahannya ketika terjadi krisis pangan, yang sekali lagi terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980an, dimana secara global ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi seluruh penduduk dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan yang cukup pada tingkat nasional dan global tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat individu maupun rumah tangga. Para pakar dan praktisi pembangunan kemudian menyadari bahwa kerawanan pangan bisa terjadi dalam kondisi dimana ketersediaan pangan cukup tetapi kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup.

Pada akhir tahun 1990an, lembaga donor, pemerintah, dan LSM mulai mengumpulkan informasi dan variabel sosial ekonomi didalam menganalisis kerawanan pangan. Pendekatan ketahanan pangan rumah tangga yang mulai berkembang pada tahun 1980an menekankan baik ketersediaan maupun akses yang stabil terhadap pangan. Dengan demikian, pemahaman ketahanan pangan pada periode ini mulai menekankan dua aspek penting dalam ketahanan pangan, yaitu dalam arti ketersediaan pangan baik pada tingkat nasional (dan regional) dan akses individu yang stabil pada tingkat lokal.

Hal-hal lain yang menjadi perhatian adalah berkenaan dengan pemahaman pangan sebagai satu sistem (*food systems*), mulai dari subsistem produksi, subsistem yang dapat mempengaruhi komposisi dari ketersediaan pangan serta subsistem akses rumah tangga terhadap ketersediaan pangan tersebut secara stabil. Sekali lagi, perubahan pemahaman ketahanan pangan yang menekankan aspek aksesibilitas pada tingkatan rumah tangga mendapatkan legitimasinya pada Konferensi Pangan Tingkat Tinggi tahun 1996, yang diselenggarakan oleh badan PBB – FAO, dengan memberikan pengertian baru tentang ketahanan pangan, yaitu *Food Security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.*

Riset-riset tentang gizi buruk (malnutrisi) menunjukkan bahwa pangan hanyalah salah satu faktor penyebab gizi buruk. Faktor-faktor lain yang memiliki dampak kepada gizi buruk antara lain adalah konsumsi dan komposisinya (*dietary intake and diversity*), kesehatan dan penyakit, serta perawatan ibu dan anak (*maternal and child care*). Hasil-hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga merupakan syarat perlu (*necessary condition*) untuk ketahanan gizi, tetapi belum cukup (bukan *sufficient condition*) untuk menjamin ketahanan gizi.

Selanjutnya, para pakar menunjukkan bahwa ada dua proses utama yang dapat mewujudkan ketahanan gizi, yang pertama menentukan akses rumah tangga terhadap pangan bagi seluruh anggota rumah tangganya, dan yang kedua menunjukkan bagaimana pangan yang telah diperoleh tersebut dapat mencukupi kebutuhan gizi dan diserap oleh tubuh setiap anggota rumah tangga. Proses yang kedua menentukan dan berasal dari bidang kesehatan, lingkungan, budaya dan perilaku yang dapat memberikan dampak positif bagi kecukupan gizi dari pangan yang dikonsumsinya. Proses yang pertama disebut jalur ketersediaan dan akses, sedangkan jalur kedua disebut jalur konsumsi dan gizi.

Pemahaman kerawanan pangan seperti di atas, telah merubah pemahaman ketahanan pangan rumah tangga tidak hanya sekedar kemampuan/akses pangan rumah tangga dan sistem pangan, melainkan diperluas menjadi pemahaman tentang dampak dari kesehatan/penyakit, sanitasi lingkungan, pola asuh, kualitas dan komposisi konsumsi sehingga dapat memberikan dampak gizi yang cukup.

Riset yang dilakukan pada akhir 1980an dan awal 1990an menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan gizi sebagaimana pemahaman yang ada memerlukan pengembangan yang lebih komprehensif. Hasil-hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan hanyalah merupakan salah satu tujuan

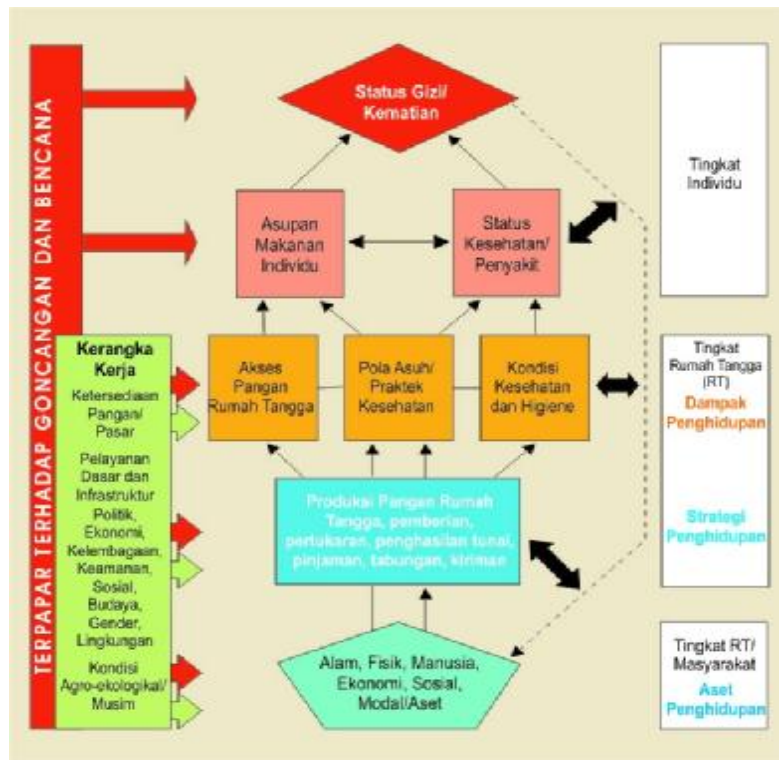
dari rumah tangga miskin; kecukupan pangan hanyalah salah satu dari berbagai faktor yang menentukan bagaimana rumah tangga miskin menentukan pengambilan keputusannya; bagaimana mereka mampu menyebar berbagai resiko, sehingga akhirnya mampu menyeimbangkan berbagai tujuan agar tetap hidup baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Beberapa kelompok mungkin bersedia untuk menahan lapar agar asetnya masih tetap dapat dipertahankan untuk memenuhi kehidupan yang lebih jangka panjang. Oleh karena itu, menempatkan ketahanan pangan sebagai satu-satunya kebutuhan yang fundamental mungkin akan memberikan kesimpulan yang salah, apalagi tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti tersebut.

Dengan demikian, perkembangan dan evolusi konsep dan isu-isu ketahanan pangan dan gizi rumah tangga membawa para pakar kepada pemahaman baru yang lebih luas dan komprehensif tentang hubungan-hubungan antara ekonomi-politik kemiskinan, gizi buruk, dan dinamika serta strategi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk tetap mempertahankan penghidupannya. Pemahaman ini memfokuskan pada tindakan-tindakan, persepsi, dan pilihan-pilihan yang diambil oleh rumah tangga miskin untuk tetap hidup. Individu dan rumah tangga akan selalu menyeimbangkan kebutuhannya, baik antara kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain serta tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik antara pangan vs non-pangan atau antara kebutuhan yang bersifat material vs non material.

Penghidupan terdiri atas kemampuan/*capabilities*, asset/*assets* (seperti toko, lahan, akses) dan aktivitas/*activities* untuk mendukung penghidupan yang sehat serta minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, interaksi sosial). Penghidupan yang lestari (*sustainable*) apabila: a) dapat mengatasi dan memulihkan keadaan apabila terjadi gejolak (*shocks and stress*), b) memberikan manfaat kepada kehidupan lainnya, baik dalam jangka pendek maupun panjang; c) memberikan manfaat penurunan kerawanan pangan pada masyarakat lainnya.

Kontribusi masing-masing komponen penghidupan terhadap kerawanan pangan belumlah dielanorasi secara mendalam dan komprehensif, tetapi hanya dilakukan terhadap pendekatan yang parsial, misalnya aspek asset yang dimana banyak kelompok masyarakat rawan pangan dipandang sebagai ketidakberpihakan pemerintah untuk meningkatkan asset kelompok marjinal ini, atau dalam segi aktivitas, dimana sebagian besar kelompok rawan pangan adalah kelompok yang berpenapatan tidak pasti (buruh, pedagang informal, dan sebagainya). Tetapi interaksi berbagai komponen sehingga menyebabkan

kerawanan pangan belum banyak dilakukan studi. Secara umum, hubungan berbagai aspek penghidupan tersebut dalam kerawanan pangan dapat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi di antaranya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.

Produksi dan ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah

tangga dan individu. Pangan mungkin tersedia dan dapat diakses namun sebagian anggota rumah tangga mungkin tidak mendapat manfaat secara maksimal apabila kelompok ini tidak memperoleh distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragaman atau apabila kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan penyerapan makanan karena penyiapan makanan yang tidak tepat atau karena sedang sakit.

Kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (*agro-environmental*), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik.

b. Kerawanan Pangan dan Gizi

Pada dasarnya keadaan rawan pangan dan gizi merupakan bagian akhir dari suatu rentetan peristiwa yang terjadi melalui proses perubahan situasi. Rawan pangan ialah suatu keadaan di suatu daerah dimana banyak penduduk mengalami kekurangan pangan. Rawan gizi ialah suatu keadaan dimana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi.

Berpangkal dari kemiskinan penduduk daerah rawan tersebut, konsumsi makanannya umumnya rendah, sehingga tingkat konsumsinya rendah. Selanjutnya daya tahan tubuhnya rendah dan dengan demikian juga tingkat kesehatan umumnya rendah. Sebagai akibatnya produktitas kerja penduduk umumnya rendah, tingkat pendapatannya juga rendah seterusnya mempengaruhi pula konsumsi makanannya. Ini merupakan lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dalam keadaan yang demikian, kejadian-kejadian yang timbul secara berurutan dapat mengakibatkan tingkat konsumsi makanan menurun pada tingkat yang demikian rendahnya pada banyak penduduk, sehingga disebut rawan pangan.

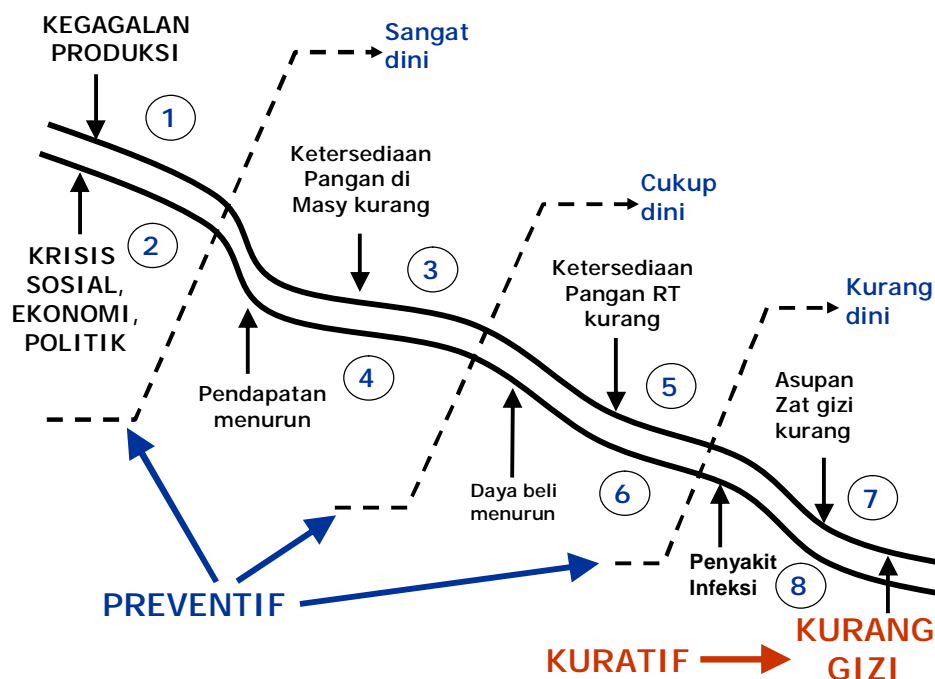
Untuk terjadinya rawan pangan beberapa peristiwa tertentu dapat terjadi pada waktu bersamaan. Kejadian kegagalan panen tidak selalu menimbulkan rawan pangan, kalau persediaan pangan di pasar dan pada keluarga masih cukup banyak dan terdapat kesempatan kerja yang cukup luas. Sebaliknya, sekalipun persediaan pangan di pasar masih cukup banyak tetapi bila kesempatan kerja menjadi sangat terbatas sebagai akibat kegagalan panen, maka akan berakibat banyak penduduk menderita kurang pangan. Jika hal

tersebut terus berkelanjutan dapat mengarah pada situasi kelaparan kekurangan gizi yang berat, seperti terjadi di beberapa daerah di masa lampau.

Untuk mencegah terjadinya kejadian rawan pangan dan gizi perlu dilakukan pengamatan dan kajian setiap indikator yang digunakan sesuai dengan urutan kejadiannya. Indikator tersebut ada yang digunakan untuk tindakan preventif dan tindakan kuratif.

Kegagalan produksi atau krisis ekonomi dapat mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun yang pada gilirannya akan menyebabkan ketersediaan pangan masyarakat menurun. Pencegahan pada tahap ini merupakan pencegahan yang sangat dini sebelum terjadinya penurunan persediaan pangan di masyarakat. Gambar 2 menggambarkan urutan kejadian yang dapat menjadi sebab timbulnya rawan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi terutama dalam merumuskan kebijakan program dan intervensi yang diperlukan baik dalam fase preventif maupun kuratif, maka diperlukan pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang mampu menangkap indikator untuk keperluan intervensi tersebut.



Gambar 2. Proses Terjadinya Kerawanan Pangan dan Gizi

Beberapa definisi kerwanan pangan dapat dilihat pada box berikut ini:

Box 1. Definitions of Chronic Food Insecurity
<p>“a persistent inability to meet minimum nutrient intake requirements” (Barrett and Sahn 2001).</p> <p>“Structural or chronic food insecurity implies a persistent inability on the part of the household to provision itself adequately with food” (FAO 2005).</p> <p>“When a household is persistently unable to meet the food requirements of its members over a long period of time” (IFAD 1997).</p> <p>“Chronic food insecurity is a trend in food consumption that involves an inability to meet food requirements over a long period” (IFAD 1997).</p> <p>“the inability of a household or an individual to meet the minimum daily food requirements for a long period of time” (FIVIMS 2002).</p> <p>“Chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and/or quality, resulting from household poverty” (WFS 1996).</p> <p>“Chronic food insecurity exists when households are unable in normal times to meet food needs because they lack sufficient income, land or productive assets, or experience high dependency ratios, chronic sickness or social barriers” (WFP 2004).</p> <p>“chronic food insecurity occurs when people are unable to meet their minimum food requirements over a sustained period of time. This is usually associated with slowly changing factors which have increased people’s exposure to shocks or else decreased their ability to cope with the effects of these shocks – essentially increased their vulnerability” (DFID 2004).</p>

Box 2. Definitions of Transitory Food Insecurity
<p>“a sudden (and often precipitous) drop in the ability to purchase or grow enough food to meet physiological requirements for good health and activity” (Barrett and Sahn 2001).</p> <p>“the sudden reduction of a household’s access to food to below the nutritionally adequate level” (IFAD n.d.).</p> <p>“transitory food insecurity concerns <i>shocks</i> that briefly push the <i>level</i> of food consumption below the requirements” (IFAD n.d.).</p> <p>“Transitory vulnerability to food insecurity involves a temporary inability to meet food needs or smooth consumption levels” (WFP 2005b).</p> <p>“Transitory food insecurity affects households that are able to meet their minimum food needs at normal times, but are unable to do so after a shock” (WFP 2004).</p> <p>“Transitory food insecurity occurs when there is a temporary inability to meet food needs, usually associated with a specific shock or stress such as drought, floods or civil unrest” (DFID 2002).</p> <p>“<i>Transitory food insecurity</i>: being unable to meet the food intake needs when specific fluctuations or shocks affect income or means to access food, without sacrificing productive assets or undermining the human capital” (Dhur 2005).</p>

BAB III PELAKSANAAN

A. Data yang Dikumpulkan

1. Data Bulanan

Data bulanan untuk analisis di tingkat provinsi dikumpulkan dari laporan Tim Pokja Provinsi. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal yang berasal dari laporan Tim Pokja Provinsi.

Tabel 1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	A. luas tanam B. luas panen C. luas puso D. Cadangan Pangan	Laporan Tim Pokja Provinsi BPS BKP/BULOG	Harap disebutkan sumber data yang digunakan
B. Akses Terhadap Pangan	Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)	Laporan Tim Pokja Provinsi BPS	Harap disebutkan sumber data yang digunakan
C. Pemanfaatan Pangan	I. Angka Balita Ditimbang (D) II. Angka Balita Naik Berat Badan (N) III. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T)	Laporan Tim Pokja Provinsi Kementerian Kesehatan	Harap disebutkan sumber data yang digunakan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
	IV. Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) V. Kasus gizi buruk yang ditemukan		
D. Spesifik Lokal	Jumlah tindak kejahatan setempat, jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, perubahan cuaca, dll	Laporan Tim Pokja Provinsi	-
E. Data Pendukung	a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir	Kementerian Pertanian dan BPS	Digunakan untuk analisis bulanan

2. Data Tahunan

Data tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) pemanfaatan pangan.

Tabel 2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Produksi setara beras	Laporan Tim Pokja Provinsi BPS	ATAP yang keluar pada bulan Juli tahun berjalan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
	b. Jumlah penduduk tengah tahunan c. Cadangan pangan pemerintah	BPS BULOG/Badan Ketahanan Pangan	dan menggunakan data ARAM II tahun berjalan Data proyeksi penduduk tengah tahun
B. Akses Terhadap Pangan	a. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I b. Harga c. IPM d. NTP	Laporan Tim Pokja Provinsi BKKBN BPS BPS BPS	Analisis Deskriptif
C. Pemanfaatan Pangan	a. Jumlah balita b. Balita gizi buruk c. Balita gizi kurang	Laporan Tim Pokja Provinsi Kementerian Kesehatan	Berat Badan/umur

A. Pengolahan dan Analisis Data

1. Bulanan

a. Ketersediaan Pangan

Tabel 3. Analisis Ketersediaan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan
2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r < 5$	3 = Rawan

Dalam rangka memperkuat analisis ketersediaan bulanan juga dilakukan analisis deskriptif pada data-data pendukung yaitu luas panen dan cadangan pangan yang ada pada bulan bersangkutan.

b. Akses Pangan

Tabel 4. Analisis Akses Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
5	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas gula dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
6	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas minyak goreng dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
8	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas telur dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang (D)	$r > 90$	1 = Aman
		$80 \leq r \leq 90$	2 = Waspada
		< 80	3 = Rawan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rawan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
3	Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	A. = Rawan

d. Komposit

Tabel 6. Indikator Komposit Ketersediaan Pangan

	Persentase rata-rata luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulanan 5 tahun			
Persentase rata-rata luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulanan 5 tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

Total bobot 2 = warna hijau

Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning

Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

Tabel 7. Indikator Komposit Akses Pangan

		Indiaktor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7														
Indikator 8	Bobot	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Keterangan:

Total bobot 8 – 11 = warna hijau

Total bobot 12 – 17 = warna kuning

Total bobot 18 – 24 = warna merah

Tabel 8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan

		Indikator 1 + 2				
Indikator 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

Tabel 9. Keterangan Warna Komposit Analisis Bulan

Indikator Komposit	Warna	Bobot
Ketersediaan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Akses	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Pemanfaatan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3

Tabel 10. Analisis Komposit Bulanan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

a. Spesifik Lokal

Gejala akan terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang berarti jika dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rawan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

b. Investigasi

Analisis data hasil investigasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat permasalahan dan upaya penanganan masalah yang dilakukan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dengan hasil analisis investigasi diharapkan dapat:

- 1) Menentukan kelompok sasaran (rumahtangga)
- 2) Menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan (apa, jumlah, berapa lama)

Investigasi yang dilakukan oleh provinsi merupakan *cross check* hasil laporan investigasi kabupaten.

2. Tahunan

Analisis situasi pangan dan gizi tahunan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator: (1) aspek ketersediaan, (2) aspek akses pangan, dan (3) aspek pemanfaatan pangan.

a. Aspek ketersediaan

Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

dimana : F = Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari

P_{food} = Produksi Netto Pangan Sereal

t_{pop} = total populasi

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan sereal per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana :

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Sereal.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan sereal, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih sereal (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan sereal di daerah tersebut.

Tabel 11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Indikator	Nilai (r)	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < r \leq 1,14$	2	Kuning
	$r < 0,90$	3	Merah

b. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan KB.

Tabel 12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
% Pra Sejahtera dan Sejahtera I	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

Selain itu untuk memperkuat analisis aspek akses juga dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data pendukung seperti data time series harga bulanan, Nilai Tukar Petani, dan Indeks Pembangunan Manusia.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada Balita	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

d. Analisis Komposit

Ketiga indikator digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi wilayah, maka dapat menggunakan tahapan sebagai berikut :

- Menjumlahkan ketiga nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan.
- Jumlah ketiga nilai indikator akan diperoleh maksimum 9 dan terendah 3.

Tabel 14. Analisis Komposit Tahunan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Skor	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

Hasil analisis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan intervensi penanganan. Hasil analisis juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta untuk mempermudah dalam mensosialisasikan dan advokasi pengambilan kebijakan.

Peta situasi pangan dan gizi adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah dan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dengan demikian maka peta situasi pangan dan gizi merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu peta pangan, peta rawan gizi, dan peta kemiskinan. Data yang digunakan dalam penyusunan peta tersebut adalah hasil analisis dari tiga indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang diuraikan pada hasil analisis sebelumnya. Peta rawan pangan dan gizi sangat berguna bagi pemerintah daerah, untuk :

- a. Mengidentifikasi wilayah - wilayah rawan
- b. Mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi
- c. Memperbaiki kualitas perencanaan dibidang pangan dan gizi.

Selain tujuan di atas, hasil dari pemetaan situasi pangan dan gizi ini dapat digunakan untuk mengamati keterkaitan antar sektor, menajamkan sasaran baik penduduk maupun wilayah itu sendiri, serta kemungkinan faktor penyebab. Selain itu pemetaan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program intervensi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk kepentingan pemetaan kerawanan pangan dan gizi ini, setiap wilayah bisa menyediakan empat lembar peta wilayah (ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan dan komposit situasi pangan dan gizi).

A. Pelaporan

Pelaporan di tingkat pusat adalah sebagai berikut:

- c. Pokja Pangan dan Gizi tingkat pusat mengolah, menganalisa dan membahas laporan dari tingkat provinsi, sehingga tersusun informasi tentang situasi pangan dan gizi setiap provinsi. Hal ini dilaksanakan satu kali setiap bulan dan disampaikan kepada Ketua Harian DKP.
- b. Menyusun upaya penanggulangan dengan berbagai alternatif sebagai bahan pengambilan keputusan untuk Ketua Harian DKP.
- c. Pembahasan situasi produksi pangan dan situasi gizi oleh DKP yang dilakukan setiap bulan.
- d. Pokja Pangan dan Gizi mengkompilasi laporan dari provinsi dan menyiapkan laporan untuk disampaikan ke Ketua Harian DKP.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pusat membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pusat dengan susunan Pokja/Tim minimal sebagai berikut:

1. Sekretaris: BKP/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat pusat
2. Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait, antara lain:
 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 - Kementerian Perikanan dan Kelautan
 - Kementerian Kehutanan
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Tenaga Kerja
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Perdagangan
 - Badan Pusat Statistik
 - BKKBN
 - Kementerian Sosial
 - Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
 - BULOG

Tugas umum Pokja/Tim SKPG di tingkat pusat antara lain:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi.
- b. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat provinsi antara lain:

- a. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).
- b. Menyusun peringkat provinsi berdasarkan laporan SKPG provinsi
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan.

- d. Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Pusat.
- e. Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan sangat tergantung adanya: koordinasi antar instansi terkait, dukungan dari Pemerintah Daerah, dan komitmen Tim Pokja untuk melakukan aktivitas kegiatan SKPG secara rutin berkelanjutan.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparat pusat dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan dan akses pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi dalam rangka melakukan investigasi dan intervensi.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA/KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Lampiran 2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT PROVINSI

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2010**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

VI. PENDAHULUAN

- E. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia
- F. Tujuan
- G. Sasaran
- H. Keluaran
- I. Ruang Lingkup

VII. PELAKSANAAN

- A. Data yang Dikumpulkan
- B. Jenis Formulir
- C. Pengolahan dan Analisis Data
- D. Pelaporan dan Evaluasi

VIII. PENGORGANISASIAN

IX. PENUTUP

DAFTAR TABEL

1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan
2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan
3. Analisis Ketersediaan Bulanan
4. Analisis Akses Pangan Bulanan
5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan
6. Indikator Komposit Ketersediaan Bulanan
7. Indikator Komposit Akses Pangan
8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan Bulanan
9. Keterangan Warna Komposit Bulanan
10. Analisis Komposit Bulanan
11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan
12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan
13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan
14. Analisis Komposit Tahunan
15. Jadwal Pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Form A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan
2. Form A2. Akses Pangan Bulanan
3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan
4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal
5. Form A5. Investigasi
6. Form B1. Aspek Ketersediaan Tahunan
7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan
8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia

Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi seluruh wilayah Indonesia.

Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang usaha pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas dimulai dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di Indonesia pada tahun 1979. Proyek penelitian dan pengembangan SKPG dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan dukungan dari *Cornell University* Amerika Serikat. Dari pilot proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh proses pengembangan Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pilot proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi. Oleh karena itu dalam periode 1990-1997 SKPG dikembangkan dengan lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), (2) Pemantauan Status Gizi, dan (3) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG).

SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban: (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan. Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

B. Tujuan

Pedoman ini memuat penjelasan teknis pelaksanaan dan penerapan SKPG di tingkat provinsi. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparat daerah di tingkat provinsi dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi.

C. Sasaran

Pemerintah daerah Provinsi dalam rangka pengelolaan SKPG.

D. Keluaran

1. Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan
2. Tersedianya informasi hasil investigasi daerah yang diindikasikan rawan pangan
3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi

4. Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (*indepth investigation*) bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat provinsi.

BAB II PELAKSANAAN

A. Data yang Dikumpulkan

1. Data Bulanan

Data bulanan untuk analisis di tingkat provinsi dikumpulkan dari laporan Tim Pokja Kabupaten. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal yang berasal dari laporan Tim Pokja Kabupaten.

Tabel 1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Luas tanam b. Luas puso c. Luas panen d. Cadangan Pangan	Laporan Tim Pokja Kabupaten Dinas Pertanian Provinsi BPS Provinsi BULOG/BKP	Harap disebutkan sumber data yang digunakan
B. Akses Terhadap Pangan	Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)	Laporan Tim Pokja Kabupaten BPS Provinsi	Harap disebutkan sumber data yang digunakan
C. Pemanfaatan Pangan	a. Angka Balita Ditimbang (D) b. Angka Balita Naik Berat Badan (N)	Laporan Tim Pokja Kabupaten Dinas Kesehatan Provinsi	Harap disebutkan sumber data yang digunakan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
	<p>c. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T)</p> <p>d. Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM)</p> <p>e. Kasus gizi buruk yang ditemukan</p>		
s	<p>Jumlah tindak kejahatan, jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, perubahan cuaca, dll</p>	<p>Laporan Tim Pokja Kabupaten</p>	-
Data Pendukung	<p>a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir</p>	<p>Dinas Pertanian dan BPS Provinsi</p>	<p>Digunakan untuk analisis bulanan</p>

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
	b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir		

3. Data Tahunan

Data tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) pemanfaatan pangan.

Tabel 2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Produksi setara beras	Laporan Tim Pokja Kabupaten Dinas Pertanian Provinsi BPS Provinsi	ATAP yang keluar pada bulan Juli tahun berjalan dan menggunakan data ARAM II tahun berjalan
	b. Jumlah penduduk tengah tahunan	BPS Provinsi	Data proyeksi penduduk tengah tahun
	c. Cadangan pangan pemerintah	Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi	
B. Akses Terhadap Pangan	a. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Laporan Tim Pokja Kabupaten SKPD KB Provinsi	
	b. Harga	BPS/Dinas Perdagangan	Analisis Deskriptif

Kelompok	Indikator	Sumber Data	Keterangan
	c. IPM d. NTP	Provinsi BPS Provinsi BPS Provinsi	
C. Pemanfaatan Pangan	c. Jumlah balita d. Balita gizi buruk (-3 SD) e. Balita gizi kurang (-2 SD)	Laporan Tim Pokja Kabupaten Dinas Kesehatan Provinsi	

B. Jenis Formulir

Jenis formulir yang digunakan dalam pengumpulan data:

Formulir A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan (Lampiran 1)

Formulir A2. Aspek Akses Pangan Bulanan (Lampiran 2)

Formulir A3. Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan (Lampiran 3)

Formulir A4. Aspek Indikator Spesifik Lokal (Lampiran 4)

Formulir A5. Investigasi Rumah tangga (Lampiran 5)

Formulir B1. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan (Lampiran 6)

Formulir B2. Aspek Akses Pangan Tahunan (Lampiran 7)

Formulir B3. Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan (Lampiran 8).

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan

a. Ketersediaan Pangan

Tabel 3. Analisis Ketersediaan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan

2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r < 5$	3 = Rawan

Dalam rangka memperkuat analisis ketersediaan bulanan juga dilakukan analisis deskriptif pada data-data pendukung yaitu luas panen dan cadangan pangan yang ada pada bulan bersangkutan.

b. Akses Pangan

Tabel 4. Analisis Akses Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
5	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
	gula dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	> 15	3 = Rawan
6	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas minyak goreng dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
8	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas telur dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang (D)	$r > 90$	1 = Aman
		$80 \leq r \leq 90$	2 = Waspada
		< 80	3 = Rawan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rawan
3	Persentase balita yang tidak	$r < 10$	1 = Aman

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
	naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rawan

f. Komposit

Tabel 6. Indikator Komposit Ketersediaan Pangan

	Persentase rata-rata luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulanan 5 tahun			
Persentase rata-rata luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulanan 5 tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

Total bobot 2 = warna hijau

Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning

Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

Tabel 7. Indikator Komposit Akses Pangan

		Indiaktor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7														
Indikator 8	Bobot	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Keterangan:

Total bobot 8 – 11 = warna hijau

Total bobot 12 – 17 = warna kuning

Total bobot 18 – 24 = warna merah

Tabel 8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan

		Indikator 1 + 2				
Indikator 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

Tabel 9. Keterangan Warna Komposit Analisis Bulan

Indikator Komposit	Warna	Bobot
Ketersediaan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Akses	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Pemanfaatan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3

Tabel 10. Analisis Komposit Bulanan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

g. Spesifik Lokal

Gejala akan terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang berarti jika dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rawan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

h. Investigasi

Analisis data hasil investigasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat permasalahan dan upaya penanganan masalah yang dilakukan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dengan hasil analisis investigasi diharapkan dapat:

- 1) Menentukan kelompok sasaran (rumah tangga)
- 2) Menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan (apa, jumlah, berapa lama)

Investigasi yang dilakukan oleh provinsi merupakan *cross check* hasil laporan investigasi kabupaten.

3. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Tahunan

Analisis situasi pangan dan gizi tahunan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator: (1) aspek ketersediaan, (2) aspek akses pangan, dan (3) aspek pemanfaatan pangan.

a. Aspek ketersediaan

Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Dimana : F = Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari
 P_{food} = Produksi Netto Pangan Sereal
 t_{pop} = total populasi

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan sereal per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana : C_{norm} = Konsumsi Normatif (300 gram); dan
 F = Ketersediaan Pangan Sereal.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan sereal, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih sereal (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan sereal di daerah tersebut.

Tabel 11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Indikator	Nilai (r)	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < r \leq 1,14$	2	Kuning

dibandingkan dengan konsumsi normative	$r < 0,90$	3	Merah
--	------------	---	-------

b. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan KB.

Tabel 12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
% Pra Sejahtera dan Sejahtera I	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

Selain itu untuk memperkuat analisis aspek akses juga dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data pendukung seperti data time series harga bulanan, Nilai Tukar Petani, dan Indeks Pembangunan Manusia.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada Balita	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

d. Analisis Komposit

Ketiga indikator digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi wilayah, maka dapat menggunakan tahapan sebagai berikut :

- Menjumlahkan ketiga nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan.
- Jumlah ketiga nilai indikator akan diperoleh maksimum 9 dan terendah 3.

Tabel 14. Analisis Komposit Tahunan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Skor	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

Hasil analisis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan intervensi penanganan. Hasil analisis juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta untuk mempermudah dalam mensosialisasikan dan advokasi pengambilan kebijakan.

Peta situasi pangan dan gizi adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah dan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dengan demikian maka peta situasi pangan dan gizi merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu peta pangan, peta rawan gizi, dan peta kemiskinan. Data yang digunakan dalam penyusunan peta tersebut adalah hasil analisis dari tiga indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang diuraikan pada hasil analisis sebelumnya. Peta rawan pangan dan gizi sangat berguna bagi pemerintah daerah, untuk :

- a. Mengidentifikasi wilayah - wilayah rawan
- b. Mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi
- c. Memperbaiki kualitas perencanaan dibidang pangan dan gizi.

Selain tujuan di atas, hasil dari pemetaan situasi pangan dan gizi ini dapat digunakan untuk mengamati keterkaitan antar sektor, menajamkan sasaran baik penduduk maupun wilayah itu sendiri, serta kemungkinan

faktor penyebab. Selain itu pemetaan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program intervensi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk kepentingan pemetaan kerawanan pangan dan gizi ini, setiap wilayah bisa menyediakan empat lembar peta wilayah (ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan dan komposit situasi pangan dan gizi).

D. Pelaporan dan Evaluasi

1. Pelaporan

Pelaporan di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pokja Pangan dan Gizi tingkat provinsi mengolah, menganalisa dan membahas laporan dari tingkat kabupaten, sehingga tersusun informasi tentang situasi pangan didaerahnya. Hal ini dilaksanakan satu kali setiap bulan dan disampaikan kepada ketua DKP tingkat provinsi.
- b. Menyusun upaya penanggulangan dengan berbagai alternatif sebagai bahan pengambilan keputusan untuk Gubernur/KDH Tk. I.
- c. Pembahasan situasi produksi pangan dan situasi gizi oleh DKP provinsi yang dilakukan setiap bulan.
- d. Pokja Pangan dan Gizi mengkompilasi laporan dari kabupaten dan menyiapkan laporan untuk disampaikan ke DKP Pusat

Tabel 15. Jadwal Pelaporan dari Provinsi ke Pusat

Frekuensi Pengumpulan	Jenis Formulir	Waktu Pelaporan (Paling Lambat)
Bulanan	A1, A2, A3, A4,	Tanggal 25 setelah bulan yang bersangkutan berakhir
Tahunan	B1, B2, B3	Tanggal 31 Agustus tahun berjalan

2. Evaluasi

Evaluasi tingkat provinsi dilakukan enam bulan satu kali. Evaluasi dilakukan melalui rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Ketua DKP.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Provinsi membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan susunan Pokja/Tim minimal sebagai berikut:

1. Sekretaris: BKP/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat provinsi
2. Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait, antara lain:
 - Bappeda
 - Unsur Pemda (Sekda, Asisten)
 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
 - Dinas Kesehatan
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Kantor Statistik
 - SKPD KB
 - Dinas Sosial
 - Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam
 - Divisi Regional Perum Bulog
 - Kepolisian Daerah

Tugas umum pokja SKPG di tingkat provinsi antara lain:

- a. Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi.
- c. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat provinsi antara lain:

- a. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).

- b. Menyusun peringkat kabupaten berdasarkan laporan SKPG kabupaten
- c. Melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan berdasarkan laporan SKPG kabupaten
- d. Menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.
- e. Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Pusat.
- f. Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, agar dijadikan sebagai pedoman petugas dalam upaya mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi daerah setempat.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi.

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA/KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,**

SUSWONO

Lampiran 1a. Formulir A11. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan

Provinsi:

Bulan :

Tahun :

No	Kabupaten	Luas T anam	Rata-rata luas	Luas Puso	Rata-rata luas puso	Luas tanam bulan berjalan	Bobot	Luas puso bulan berjalan	Bobot	Kompositi	Sumber Data yg Digunakan
		(Ha)	tanam bulan bersangkuaran 5 tahun terakhir (Ha)	(Ha)	bulan bersangkuaran 5 tahun terakhir	dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkuaran 5 tahun terakhir (%)	8	dibandingkan dengan rata-rata puso bulan bersangkuaran 5 tahun terakhir (%)	10		
1	2	3	4	5	6	7 = ((3/4) x 100) - 100	8	9 = ((6/7) x 100) - 100	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15	Jumlah										

Ket: Kolom 7

Kolom 9

Kolom 11

$r \geq 5$ 1 = Aman
 $-5 \leq r < 5$ 2 = Waspada
 $-r < -5$ 3 = Rawan

$r < -5$ 1 = Aman
 $5 \leq r < -5$ 2 = Waspada
 $r < 5$ 3 = Rawan

Total bobot 2 = warna hijau
 Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning
 Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

..... 2010
 Sekretarisat Pokja
 Petugas

Lampiran 1b. Form A12. Analisis Ketersediaan Bulanan**Provinsi :****Bulan :**

No	Kabupaten	Luas Panen			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 1c. Form A13. Analisis Ketersediaan**Provinsi :****Bulan :**

No	Kabupaten	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan

Provinsi :
 Bulan : Tahun :

No.	KABUPATEN	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D)	JUMLAH BALITA BBAIK (N)	JUMLAH BALITA BGM	BALITA YANG TIDAK BAIK	PENCAPAIAN		
							N/D (%)	BGM/D (%)	2T/D (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Keterangan:

Kolom 8
 Persentase
 $r > 90$
 $80 \leq r \leq 90$
 < 80

Kolom 9
 Bobot
 1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

Kolom 9
 $r < 5$
 $5 \leq r \leq 10$
 > 10

Kolom 10
 $r < 10$
 $10 \leq r \leq 20$
 > 20

Kolom 10
 $r < 10$
 $10 \leq r \leq 20$
 > 20

1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

Sekretariat Pokja
 Petugas

..... 2010

Lampiran 4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal

Kabupaten:

Bulan:

Tahun:

No	Jenis Indikator	Bulan Lalu	Bulan Ini	Kesimpulan			Keterangan (Sumber Informasi)
				Normal	Menurun	Meningkat	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas

.....

Lampiran 5. Form A5. Investigasi

NOMOR KUESIONER:				
A DATA WILAYAH				
A.1	Provinsi		A.3 Kecamatan	A.5 Desa/Kota
A.2	Kabupaten		A.4 Desa	
A.6	Dusun (RT/RW)			A.7 Tanggal
A.8	Nama Kepala Rumah Tangga			
B KOMPOSISI RUMAH TANGGA				
B.1	Kepala Rumah Tangga (Laki-laki/Perempuan)			
B.2	Pendidikan Kepala Rumah Tangga (Tidak Sekolah/SD/SMP/SMA/S1/S2/S3)			
B.3	Umur Kepala Rumah Tangga			
B.4	Jumlah Anggota Keluarga (termasuk pembantu)			
B.5	Anak < 5 thn		B.8 Dewasa 18-60 tahun	
B.6	Anak 5-11 thn		B.9 Orang tua > 60 tahun	
B.7	Remaja 12-17 thn			
C SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA				
C.1	Bertani/berkebun dan menjual hasilnya			
C.2	Beternak hewan/ikan dan menjual hasilnya			
C.3	Menangkap hewan/ikan dan menjual hasilnya			
C.4	Mencari hasil hutan (rotan/cendana/gaharu) dan menjual hasilnya			
C.5	Pengrajin produk lokal dan menjual hasilnya			
C.6	Buruh Pertanian dan menerima upah			
C.7	Buruh Non-Pertanian/Industri dan menerima upah			
C.8	Jasa transportasi kecil (Ojek/Becak/Kereta Kuda)			
C.9	Jasa transportasi besar (Angkot/Bis/Truk)			
C.10	Pedagang Keliling			
C.11	Pedagang Kecil/Kios			
C.12	Pedagang Besar/Agen			
C.13	Jasa penginapan/tempat tinggal/tempat usaha (kost/kontrakan)			
C.14	Pegawai Pemerintah - PNS (termasuk aparat desa yang menerima gaji)			
C.15	Polri / TNI			
C.16	Pegawai swasta dan menerima gaji			
C.17	Pensiunan Swasta/Pemerintah			
C.18	Menerima kiriman uang dari anggota keluarga lainnya			
C.19	Pemulung			
C.20	Bekerja serabutan/tidak tetap			

D	KONSUMSI PANGAN		
	Berapa kali anggota keluarga berikut ini makan dalam satu hari dalam 7 hari terakhir		
D.1	Anak < 5 tahun	D.2. Ibu Hamil dan Menyusui	D.3. Anggota Keluarga Lainnya
	Berapa hari dalam 7 hari terakhir anggota keluarga mengkonsumsi jenis makanan berikut		
D.4	Karbohidrat (Roti/Biskuit/Nasi/Jagung/Singkong/Ubi Jalar/Mie/Bihun)	7	
D.5	Protein Nabati (Tempe/Tahu/Kacang-kacangan)	1?	
D.6	Sayur-sayuran	?	
D.7	Buah-Buahan		
D.8	Proten Hewan (Daging/Hari/Limpa/Jantung/Telur/Ikan)		
D.9	Produk Susu (Susu/Keju/Yogurt)		
D.10	Produk Gula (Gula/Madu/Selai)		
D.11	Minyak Goreng/Mentega/Margarin		
D.12	Bumbu-bumbu (Cabai/Bawang/Jahe/dll)		

E	KESULITAN UMUM	
	Jenis Kesulitan Umum yang dihadapi keluarga	
E.1	Masalah Pertanian/Perkebunan/Perikanan (Gagal Panen, Hasil Sedikit, dll)	Ya
E.2	Masalah Produksi (Bahan Baku Sulit, Tenaga Kerja Sedikit, dll)	Tidak
E.3	Turunnya harga jual produk/jasa	?
E.4	Naiknya harga-harga non-pangan	?
E.5	Naiknya Harga Pangan	Ya
E.6	Tingginya Biaya Pendidikan	?
E.7	Tingginya Biaya Pengobatan	
E.8	Tingginya Biaya pembangunan/perbaikan tempat tinggal	
E.9	Tingginya Biaya perayaan/pesta	
E.10	Meningkatnya Kejahatan	
E.11	Kerusakan lingkungan/Kesulitan Air Bersih	
E.12	Kesulitan lainnya Sebutkan	

F	PEMECAHAN MASALAH	
	Dalam 7 hari terakhir, berapa hari hal dibawah ini dilakukan (0: Tidak pernah; 7: Setiap Hari)	
F.1	Membeli/mengkonsumsi makanan dengan kualitas lebih rendah	
F.2	Mengurangi porsi makan	
F.3	Mengurangi jumlah makan dalam sehari	
F.4	Berhutang atau menumpang makan pada keluarga/tetangga	
F.5	Mengurangi makanan orang dewasa dan mengutamakan anak-anak	

	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Enumerator			
Pemeriksa			
Sekretaris Pokja			

Lampiran 6a. Form B11. Aspek Ketersediaan Tahunan

Provinsi:

Tahun :

No	Kabupaten	Perkiraan Produksi (Ton)				Sumber Data yg Digunakan
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Ket:

- 1 Jumlah Penduduk Tengah Tahun :
2 Konsumsi Normatif :

....., 2010
Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 6b. Form B12. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Provinsi :

Tahun :

No	Kabupaten	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)				Sumber Data yg Digunakan
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

....., 2010

Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 6c. Analisis Aspek Ketersediaan Tahunan

1) Padi

- ▼ Produksi padi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Gabah:

$$\text{Benih (s)} = P \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = P \times 0,44\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = P \times 5,4\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) 2006/07.

- ▼ Untuk mendapat produksi netto beras (Rnet), kalikan data netto padi dengan Faktor Konversi (c) di masing-masing kabupaten. Untuk seluruh kabupaten di suatu provinsi maka Faktor Konversi nasional adalah 0,632 (atau 63,2%). Maka, produksi netto beras dihitung sebagai berikut:

$$R_{\text{net}} = c * P_{\text{net}}$$

di mana:

$$P_{\text{net}} = P - (s+f+w)$$

2). Jagung

- ▼ Data produksi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Jagung (Mnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Jagung

$$\text{Benih (s)} = M \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = M \times 6\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = M \times 5\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Jagung (Mnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$M_{\text{net}} = M - (s+f+w)$$

3). Umbi-umbian

1. Ubi Kayu

- ✓ Produksi ubi kayu kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Ubi Kayu (C_{net}), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

<p>Perhitungan ubi kayu Pakan ternak (f)= C x 2% Tercecer (w)= C x 2,13%</p>

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Kayu (C_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$C_{net} = C - (f+w)$

3. Ubi Jalar

- ✓ Produksi ubi jalar Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan ubi jalar (SP_{net}), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

<p>Perhitungan ubi jalar Pakan ternak (f)= SP x 2% Tercecer (w)= SP x 10%</p>
--

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Jalar (SP_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$SP_{net} = SP - (f+w)$

Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar (T_{net}) agar setara dengan beras, maka harus dikalikan dengan 1/3 (1 kg beras atau jagung ekivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori), dengan perhitungan sebagai berikut:

$T_{net} = 1/3 * (C_{net} + SP_{net})$
--

Maka, Produksi Netto Pangan Serealia (Padi, Jagung dan umbi-umbian) atau P_{food} :

$P_{food} = R_{net} + M_{net} + T_{net}$
--

Penghitungan Ketersediaan Pangan Serealialia per Kapita per Hari

Gunakan data Total Populasi tengah tahun (t_{pop}) kabupaten pada tahun yang sama dengan data produksi pangan serealialia. Ketersediaan pangan serealialia per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Perhitungan produksi pangan tingkat kabupaten dilakukan dengan menggunakan data rata-rata produksi tiga tahunan (2005–2007) untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar karena sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari serealialia dan umbi-umbian. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari tanaman serealialia. Data rata-rata bersih dari komoditi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dihitung dengan menggunakan faktor konversi baku.

Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealialia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan serealialia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealialia. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealialia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealialia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr serealialia per hari.

Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari; karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan serealialia, kebiasaan/budaya, dll).

Rasio Ketersediaan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana,

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Serealialia.

Jika nilai 'I_{AV}' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan serealialia, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih serealialia (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai 'I_{AV}' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan serealialia di daerah tersebut.

Lampiran 7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan

Provinsi :
Tahun:

No	Kabupaten	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Miskin (Total) $6 = (4 + 5)$	Persentase KK Miskin $7 = (6/3) \times 100\%$	Bobot	Sumber Data yg Digunakan
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (6/3) x 100%	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
	Jumlah		-	-	-	-		

Keterangan : Kolom 8
Persentase (r)
(%)

Bobot
1
2
3

Warna
Hijau
Kuning
Merah

....., 2010
Sekretariat Pokja
Petugas
.....

Lampiran 8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan

Provinsi :
 Bulan : Tahun

No	Kabupaten	Jumlah Balita	Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	% KEP	Bobot KEP
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	Jumlah	-	-	-	-	-

Keterangan:
Persentase (r)
 (%)
 r < 15
 15 ≤ r ≤ 20
 > 20

Bobot
 1
 2
 3

Warna
 Hijau
 Kuning
 Merah

....., 2010
 Sekretaris Pokja
 Petugas

Lampiran 3. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2010**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

X. PENDAHULUAN

J. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia

K. Tujuan

L. Sasaran

M. Keluaran

N. Ruang Lingkup

XI. PELAKSANAAN

E. Data yang Dikumpulkan

F. Jenis Formulir

G. Pengolahan dan Analisis Data

H. Pelaporan dan Evaluasi

XII. PENGORGANISASIAN

XIII. PENUTUP

DAFTAR TABEL

1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan
2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan
3. Analisis Ketersediaan Bulanan
4. Analisis Akses Pangan Bulanan
5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan
6. Indikator Komposit Ketersediaan Bulanan
7. Indikator Komposit Akses Pangan
8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan Bulanan
9. Keterangan Warna Komposit Bulanan
10. Analisis Skor Komposit
11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan
12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan
13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan
14. Analisis Komposit Tahunan
15. Jadwal Pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Form A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan
2. Form A2. Akses Pangan Bulanan
3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan
4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal
5. Form A5. Investigasi
6. Form B1. Aspek Ketersediaan Tahunan
7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan
8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia

Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi seluruh wilayah Indonesia.

Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang usaha pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas dimulai dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di Indonesia pada tahun 1979. Proyek penelitian dan pengembangan SKPG dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan dukungan dari *Cornell University* Amerika Serikat. Dari pilot proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh proses pengembangan Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pilot proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi. Oleh karena itu dalam periode 1990-1997 SKPG dikembangkan dengan lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), (2) Pemantauan Status Gizi, dan (3) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG).

SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban: (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di wilayah provinsi. Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

B. Tujuan

Pedoman ini memuat penjelasan teknis pelaksanaan dan penerapan SKPG di tingkat kabupaten. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah di dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu daerah.

C. Sasaran

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan SKPG.

D. Keluaran

1. Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan
2. Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan rawan pangan
3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi

4. Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (*indepth investigation*) bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kabupaten.

BAB II PELAKSANAAN

A. Data yang Dikumpulkan

1. Data Bulanan

Data bulanan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan, dan (4) spesifik lokal

Tabel 1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Luas tanam	Dinas Pertanian	SP Padi SP Palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar) Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP)
	b. Luas puso	Dinas Pertanian	
	c. Luas panen	Dinas Pertanian	
	d. Cadangan Pangan	BKP/BULOG	
B. Akses Terhadap Pangan	Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)	Dinas Perindag/BKP	Survei Harga
C. Pemanfaatan Pangan	a. Angka Balita Ditimbang (D) b. Angka Balita Naik Berat Badan (N)	Dinas Kesehatan	Laporan Penimbangan dan KLB

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
	c. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) d. Angka Balita dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) e. Kasus gizi buruk yang ditemukan		
D. Spesifik Lokal	Jumlah tindak kejahatan, jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, cuaca, dll	Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, BMKG, dll	Apabila Diperlukan
E. Data Pendukung	a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir	Dinas Pertanian dan BPS	Digunakan untuk analisis bulanan

Setelah diketahui kantong-kantong kerawanan pangan dari hasil analisis bulanan langkah selanjutnya dilakukan investigasi. Data investigasi dikumpulkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim Pangan dan Gizi. Data yang dikumpulkan antara lain: (1) kondisi umum responden, (2) Permasalahan yang dihadapi oleh responden, (3) pemecahan masalah yang telah dilakukan.

2. Data Tahunan

Data tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) pemanfaatan pangan

Tabel 2. Data, Sumber Data, dan Frekuensi Tahunan

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	d. Produksi setara beras	Dinas Pertanian BPS	ATAP yang keluar pada bulan Juli tahun berjalan dan menggunakan data ARAM II tahun berjalan Data proyeksi penduduk tengah tahun
	e. Jumlah penduduk tengah tahunan	BPS	
	f. Cadangan pangan	BKP/BULOG	
B. Akses Terhadap Pangan	a. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	SKPD KB Kab/Kota	- time series data
	b. Harga	BPS/Dinas Perindag	
	c. IPM	BPS	
	d. NTP	BPS	
C. Pemanfaatan Pangan	b. Jumlah balita	Dinas Kesehatan (hasil Pemantauan Status Gizi)	Berat Badan/Umur Berat Badan/Tinggi
	c. Persen Balita gizi buruk (-3 SD)		
	d. Persen Balita gizi kurang (-2 SD)		

B. Jenis Formulir

Jenis formulir yang digunakan dalam pengumpulan data:

Formulir A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan (Lampiran 1)

Formulir A2. Aspek Akses Pangan Bulanan (Lampiran 2)

Formulir A3. Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan (Lampiran 3)

Formulir A4. Aspek Indikator Spesifik Lokal (Lampiran 4)

Formulir A5. Investigasi Rumahtangga (Lampiran 5)

Formulir B1. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan (Lampiran 6)

Formulir B2. Aspek Akses Pangan Tahunan (Lampiran 7)

Formulir B3. Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan (Lampiran 8).

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan

a. Ketersediaan Pangan

Tabel 3. Analisis Ketersediaan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan
2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rawan

Dalam rangka memperkuat analisis ketersediaan bulanan juga dilakukan analisis deskriptif pada data-data pendukung yaitu luas panen dan cadangan pangan yang ada pada bulan bersangkutan.

b. Akses Pangan

Tabel 4. Analisis Akses Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
5	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas gula dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
6	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas minyak goreng dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
8	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas telur dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang (D)	$r \geq 80$	1 = Aman
		$70 \leq r < 80$	2 = Waspada
		< 70	3 = Rawan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	4 = Rawan
3	Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rawan

d. Komposit

Tabel 6. Indikator Komposit Ketersediaan Pangan

	Persentase rata-rata luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulanan 5 tahun			
Persentase rata-rata luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulanan 5 tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

Total bobot 2 = warna hijau

Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning

Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

Tabel 7. Indikator Komposit Akses Pangan

		Indiaktor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7															
Indikator 8	Bo bot	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
	1	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	

Keterangan:

Total bobot 8 – 11 = warna hijau

Total bobot 12 – 17 = warna kuning

Total bobot 18 – 24 = warna merah

Tabel 8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan

		Indikator 1 + 2				
Indikator 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

Tabel 9. Keterangan Warna Komposit Analisis Bulan

Indikator Komposit	Warna	Bobot
Ketersediaan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Akses	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Pemanfaatan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3

Tabel 10. Analisis Komposit Bulanan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

e. Spesifik Lokal

Gejala akan terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang berarti jika dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rawan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

f. Investigasi

Analisis data hasil investigasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat permasalahan dan upaya penanganan masalah yang dilakukan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dengan hasil analisis investigasi diharapkan dapat:

- 1) Menentukan kelompok sasaran (rumahtangga)
- 2) Menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan (apa, jumlah, berapa lama)

4. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Tahunan

Analisis situasi pangan dan gizi tahunan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator: (1) aspek ketersediaan, (2) aspek akses pangan, dan (3) aspek pemanfaatan pangan.

a. Aspek ketersediaan

Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

dimana : F = Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari

P_{food} = Produksi Netto Pangan Serealia

t_{pop} = total populasi

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan serealia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealia. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr serealia per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana :

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Sereal.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan sereal, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih sereal (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan sereal di daerah tersebut.

Tabel 11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Indikator	Nilai (r)	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < r \leq 1,14$	2	Kuning
	$r < 0,90$	3	Merah

b. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan KB.

Tabel 12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
% Pra Sejahtera dan Sejahtera I	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

Selain itu untuk memperkuat analisis aspek akses juga dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data pendukung seperti data time series harga bulanan, Nilai Tukar Petani, dan Indeks Pembangunan Manusia.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada Balita	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

d. Analisis Komposit

Ketiga indikator digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi wilayah, maka dapat menggunakan tahapan sebagai berikut :

- Menjumlahkan ketiga nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan.
- Jumlah ketiga nilai indikator akan diperoleh maksimum 9, dan jumlah yang terendah 3.

Tabel 14. Analisis Komposit Tahunan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Skor	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

Hasil analisis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan intervensi penanganan. Hasil analisis juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta untuk mempermudah dalam mensosialisasikan dan advokasi pengambilan kebijakan.

Peta situasi pangan dan gizi adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah dan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dengan demikian maka peta situasi pangan dan gizi merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu peta ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan peta tersebut adalah hasil analisis dari tiga indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang diuraikan pada hasil analisis sebelumnya. Peta rawan pangan dan gizi sangat berguna bagi pemerintah daerah, untuk :

- a. Mengidentifikasi wilayah - wilayah rawan
- b. Mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi
- c. Memperbaiki kualitas perencanaan dibidang pangan dan gizi.

Selain tujuan di atas, hasil dari pemetaan situasi pangan dan gizi ini dapat digunakan untuk mengamati keterkaitan antar sektor, menajamkan sasaran baik penduduk maupun wilayah itu sendiri, serta kemungkinan faktor penyebab. Selain itu pemetaan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program intervensi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk kepentingan pemetaan kerawanan pangan dan gizi ini, setiap wilayah bisa menyediakan empat lembar peta wilayah (ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan dan komposit situasi pangan dan gizi).

D. Pelaporan dan Evaluasi

1. Pelaporan

- a. Pokja Pangan dan Gizi (PPG) mengelola laporan dari kecamatan dan kemudian menganalisa dan membahas laporan tersebut sehingga tersusun informasi tentang situasi pangan dan gizi wilayahnya setiap bulan secara berkesinambungan.
- b. Pokja menyampaikan informasi/laporan tersebut kepada Bupati atau ketua PPG setiap bulan secara berkesinambungan.
- c. Bilamana terjadi masalah, maka Pokja menyusun alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Bupati/KDH. Tk. II..

- d. Pokja mengkompilasi laporan tingkat kecamatan dan menyampaikan laporan ke Pokja tingkat propinsi dengan tembusan ke "pusat".
- e. Pembahasan situasi pangan dan gizi dilaksanakan oleh Pokja PG yang dikoordinasikan oleh DKP/TPG kabupaten, dan dilakukan secara rutin setiap bulan.

Tabel 15. Jadwal Pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

Frekuensi Pengumpulan	Jenis Formulir	Waktu Pelaporan (Paling Lambat)
Bulanan	A1, A2, A3, A4	Tanggal 20 bulan berikutnya
Tahunan	B1, B2, B3	Tanggal 31 Juli tahun berjalan

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap tingkat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SKPG. Dari hasil evaluasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran situasi produksi dan ketersediaan pangan, situasi gizi dan kemiskinan pada setiap wilayah pelaksanaan SKPG di sektor terkait sebagai bahan untuk penyusunan kebijaksanaan/program pembangunan pangan dan gizi.

Evaluasi tiap tingkatan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi tingkat kabupaten dilakukan setiap bulan.
- 2) Evaluasi dilakukan melalui rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Ketua DKP.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Kabupaten membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan susunan Pokja/Tim minimal sebagai berikut:

1. Sekretaris: BKP/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten
2. Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait, antara lain:
 - Bappeda
 - Unsur Pemda (Sekda, Asisten)
 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
 - Dinas Kesehatan
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Kantor Statistik Kabupaten
 - SKPD-KB Kabupaten/Kota
 - Dinas Sosial
 - Bakorluh (Badan koordinasi penyuluhan)
 - Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam
 - Divisi Regional Perum Bulog
 - Kepolisian Resort

Tugas umum pokja SKPG di tingkat kabupaten antara lain:

- a. Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi.
- c. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat kabupaten antara lain:

- a. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).
- b. Melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi.
- d. Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Provinsi.
- e. Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini dijadikan sebagai acuan bagi aparat Pelaksana SKPG di daerah yang terdiri dari Instansi Pemda, BAPPEDA, Badan (Bimas) Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan BKKBN. Pedoman teknis dimaksudkan untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi aparat daerah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan SKPG pada penanganan kerawanan pangan. Oleh karena itu penjabarannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Keberhasilan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan dalam pelaksanaannya, sangat tergantung adanya: koordinasi antar instansi terkait, dukungan dari Pemerintah Daerah, dan komitmen Tim Pokja untuk melakukan aktivitas kegiatan SKPG secara rutin berkelanjutan.

Keberhasilan dalam melakukan Advokasi program SKPG kepada Pemerintah Daerah sangat penting untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan SKPG. Oleh karena itu Indikator untuk mewaspadaai masalah timbulnya kerawanan pangan dan gizi, baik indikator dari sektor pertanian, indikator sektor kesehatan dan BKKBN maupun Sektor terkait lainnya perlu dipahami dengan baik dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana petugas SKPG dilakukan melalui kegiatan pelatihan (TOT), *capacity building* (pemberdayaan petugas dan masyarakat), dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas SKPG dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis untuk merencanakan program dan melakukan intervensi daerah rawan pangan gizi.

Demikian Pedoman Pengelolaan SKPG tingkat kabupaten ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman petugas dalam upaya mengatasi kerawanan pangan dan gizi.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA/KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Lampiran 1a. Form A11 Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan : Tahun :

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)		Rata-rata luas tanam bulan bersangutan 5 tahun terakhir (Ha)		Rata-rata luas puso bulan bersangutan 5 tahun terakhir	Luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangutan 5 tahun terakhir (%)		Luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangutan 5 tahun terakhir (%)		Komposit
		3	4	5	6		7 = $((3/4) \times 100) - 100$	8	9 = $((6/7) \times 100) - 100$	10	
1	2	3	4	5	6						11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
Jumlah											

Ket: Kolom 7

$r \geq 5$ 1 = Aman
 $-5 \leq r < 5$ 2 = Waspada
 $-r < -5$ 3 = Rawan

Kolom 9

$r < -5$ 1 = Aman
 $5 \leq r < -5$ 2 = Waspada
 $r < 5$ 3 = Rawan

Kolom 11

Total bobot 2 = warna hijau
 Total bobot 3 - 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning
 Total bobot 4 - 6 dan ada bobot 3 = warna merah

....., 2010
 Sekretaris Pokja
 Petugas

Lampiran Ib. Form A12 Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan :

No	Kecamatan	Luas Panen			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2010
 Sekretaris Pokja
 Petugas

Lampiran 1c. Form A13 Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan :

No	Kecamatan	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2010
 Sekretariat Pokja
 Petugas

Lampiran 2. Form A2. Akses Pangan Bulanan

Kecamatan :

Bulan :

Tahun :

No.	Komoditi	Harga Rata-rata Bulan Berjalan di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 bulan Terakhir (Rp/Kg)	Perentase Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 bulan (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = ((3/4) \times 100) - 100$	6
1	Beras				
2	Jagung				
3	Ubi Kayu				
4	Ubi Jalar				
5	Gula				
6	Minyak Goreng				
7	Daging				
8	Telur				

Keterangan : Kolom 6

Komoditi Beras

Komoditi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, Minyak Goreng, Daging, dan Telur

Sekretariat Pokja

Perentase Bobot

$r < 5$ 1 = Aman

$5 \leq r \leq 20$ 2 = Waspada

$r > 20$ 3 = Rawan

Perentase

$r < 5$

$5 \leq r \leq 15$

> 15

Bobot

1 = Aman

2 = Waspada

3 = Rawan

Petugas

.....

Lampiran 3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan

Kabupaten :

Bulan: Tahun:

No.	KECAMATAN	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D)	JUMLAH BALITA BB NAIK (N)	JUMLAH BALITA BGM	BALITA YANG TIDAK NAIK BERAT BADANNYA DALAM 2 KALIPENIMBANGAN BERTURUT-TURUT	PENCAPAIAN		
							N/D (%)	BGM/D (%)	2T/D (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Keterangan:

Kolom 8

Persentase

r > 90
80 ≤ r ≤ 90
< 80

Bobot

1 = Aman
2 = Waspada
3 = Rawan

Kolom 9

r < 5
5 ≤ r ≤ 10
> 10

1 = Aman
2 = Waspada
3 = Rawan

Kolom 10

r < 10
10 ≤ r ≤ 20
> 20

1 = Aman
2 = Waspada
3 = Rawan

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal

Kecamatan
Bulan:

Tahun:

No	Jenis Indikator	Bulan Lalu	Bulan Ini	Kesimpulan			Keterangan (Sumber Informasi)
				Normal	Menurun	Meningkat	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

....., 2010
 Sekretaris Poljra
 Petugas

.....

Lampiran 5. Form A5. Investigasi

NOMOR KUESIONER:				
A DATA WILAYAH				
A.1	Provinsi		A.3 Kecamatan	A.5 Desa/Kota
A.2	Kabupaten		A.4 Desa	
A.6	Dusun (RT/RW)			A.7 Tanggal
A.8	Nama Kepala Rumah Tangga			
B KOMPOSISI RUMAH TANGGA				
B.1	Kepala Rumah Tangga (Laki-laki/Perempuan)			
B.2	Pendidikan Kepala Rumah Tangga (Tidak Sekolah/SD/SMP/SMA/S1/S2/S3)			
B.3	Umur Kepala Rumah Tangga			
B.4	Jumlah Anggota Keluarga (termasuk pembantu)			
B.5	Anak < 5 thn		B.8 Dewasa 18-60 tahun	
B.6	Anak 5-11 thn		B.9 Orang tua > 60 tahun	
B.7	Remaja 12-17 thn			
C SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA				
C.1	Bertani/berkebun dan menjual hasilnya			
C.2	Beternak hewan/ikan dan menjual hasilnya			
C.3	Menangkap hewan/ikan dan menjual hasilnya			
C.4	Mencari hasil hutan (rotan/cendana/gaharu) dan menjual hasilnya			
C.5	Pengrajin produk lokal dan menjual hasilnya			
C.6	Buruh Pertanian dan menerima upah			
C.7	Buruh Non-Pertanian/Industri dan menerima upah			
C.8	Jasa transportasi kecil (Ojek/Becak/Kereta Kuda)			
C.9	Jasa transportasi besar (Angkot/Bis/Truk)			
C.10	Pedagang Keliling			
C.11	Pedagang Kecil/Kios			
C.12	Pedagang Besar/Agen			
C.13	Jasa penginapan/tempat tinggal/tempat usaha (kost/kontrakan)			
C.14	Pegawai Pemerintah - PNS (termasuk aparat desa yang menerima gaji)			
C.15	Polri / TNI			
C.16	Pegawai swasta dan menerima gaji			
C.17	Pensiunan Swasta/Pemerintah			
C.18	Menerima kiriman uang dari anggota keluarga lainnya			
C.19	Pemulung			
C.20	Bekerja serabutan/tidak tetap			

D	KONSUMSI PANGAN		
	Berapa kali anggota keluarga berikut ini makan dalam satu hari dalam 7 hari terakhir		
D.1	Anak < 5 tahun	D.2. Ibu Hamil dan Menyusui	D.3. Anggota Keluarga Lainnya
	Berapa hari dalam 7 hari terakhir anggota keluarga mengkonsumsi jenis makanan berikut		
D.4	Karbohidrat (Roti/Biskuit/Nasi/Jagung/Singkong/Ubi Jalar/Mie/Bihun)		7
D.5	Protein Nabati (Tempe/Tahu/Kacang-kacangan)		1?
D.6	Sayur-sayuran		?
D.7	Buah-Buahan		
D.8	Proten Hewan (Daging/Hari/Limpa/Jantung/Telur/Ikan)		
D.9	Produk Susu (Susu/Keju/Yogurt)		
D.10	Produk Gula (Gula/Madu/Selai)		
D.11	Minyak Goreng/Mentega/Margarin		
D.12	Bumbu-bumbu (Cabai/Bawang/Jahe/dll)		

E	KESULITAN UMUM	
	Jenis Kesulitan Umum yang dihadapi keluarga	
E.1	Masalah Pertanian/Perkebunan/Perikanan (Gagal Panen, Hasil Sedikit, dll)	Ya
E.2	Masalah Produksi (Bahan Baku Sulit, Tenaga Kerja Sedikit, dll)	Tidak
E.3	Turunnya harga jual produk/jasa	?
E.4	Naiknya harga-harga non-pangan	?
E.5	Naiknya Harga Pangan	Ya
E.6	Tingginya Biaya Pendidikan	?
E.7	Tingginya Biaya Pengobatan	
E.8	Tingginya Biaya pembangunan/perbaikan tempat tinggal	
E.9	Tingginya Biaya perayaan/pesta	
E.10	Meningkatnya Kejahatan	
E.11	Kerusakan lingkungan/Kesulitan Air Bersih	
E.12	Kesulitan lainnya Sebutkan	

F	PEMECAHAN MASALAH	
	Dalam 7 hari terakhir, berapa hari hal dibawah ini dilakukan (0: Tidak pernah; 7: Setiap Hari)	
F.1	Membeli/mengkonsumsi makanan dengan kualitas lebih rendah	
F.2	Mengurangi porsi makan	
F.3	Mengurangi jumlah makan dalam sehari	
F.4	Berhutang atau menumpang makan pada keluarga/tetangga	
F.5	Mengurangi makanan orang dewasa dan mengutamakan anak-anak	

	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Enumerator			
Pemeriksa			
Sekretaris Pokja			

Lampiran 6a. Form B11. Aspek Ketersediaan Tahunan

Kabupaten :
Tahun :

No	Kecamatan	Perkiraan Produksi (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Ket:

- 1 Jumlah Penduduk Tengah Tahun :
2 Konsumsi Normatif :

....., 2010
Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 6b. Form B12. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Kabupaten :
 Tahun :

No	Kecamatan	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2010
 Sekretarisat Pokja
 Petugas

Lampiran 6c. Analisis Aspek Ketersediaan Tahunan

1) Padi

- ▼ Produksi padi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Gabah:

$$\text{Benih (s)} = P \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = P \times 0,44\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = P \times 5,4\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) 2006/07.

- ▼ Untuk mendapat produksi netto beras (Rnet), kalikan data netto padi dengan Faktor Konversi (c) di masing-masing kabupaten. Untuk seluruh kabupaten di suatu provinsi maka Faktor Konversi nasional adalah 0,632 (atau 63,2%).

Maka, produksi netto beras dihitung sebagai berikut:

$$R_{net} = c * P_{net}$$

di mana:

$$P_{net} = P - (s+f+w)$$

2). Jagung

- ▼ Data produksi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Jagung (Mnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Jagung

$$\text{Benih (s)} = M \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = M \times 6\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = M \times 5\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Jagung (M_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$M_{net} = M - (s+f+w)$$

3). Umbi-umbian

1. Ubi Kayu

- ✓ Produksi ubi kayu kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Ubi Kayu (C_{net}), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan ubi kayu

$$\text{Pakan ternak (f)} = C \times 2\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = C \times 2,13\%$$

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Kayu (C_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$C_{net} = C - (f+w)$$

2. Ubi Jalar

- ✓ Produksi ubi jalar Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan ubi jalar (SP_{net}), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan ubi jalar

$$\text{Pakan ternak (f)} = SP \times 2\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = SP \times 10\%$$

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Jalar (SP_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$SP_{net} = SP - (f+w)$$

Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar (T_{net}) agar setara dengan beras, maka harus dikalikan dengan 1/3 (1 kg beras atau jagung ekuivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T_{net} = 1/3 * (C_{net} + SP_{net})$$

Maka, Produksi Netto Pangan Serealia (Padi, Jagung dan umbi-umbian) atau P_{food} :

$$P_{food} = R_{net} + M_{net} + T_{net}$$

Penghitungan Ketersediaan Pangan Serealia per Kapita per Hari

Gunakan data Total Populasi tengah tahun (t_{pop}) kabupaten pada tahun yang sama dengan data produksi pangan serealia. Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Perhitungan produksi pangan tingkat kabupaten dilakukan dengan menggunakan data rata-rata produksi tiga tahunan (2005–2007) untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar karena sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari serealia dan umbi-umbian. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari tanaman serealia. Data rata-rata bersih

dari komoditi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dihitung dengan menggunakan faktor konversi baku.

Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan serealia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealia. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr serealia per hari.

Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari; karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan serealia, kebiasaan/budaya, dll).

Rasio Ketersediaan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana,

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Serealia.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan serealia, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih serealia (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan serealia di daerah tersebut.

Lampiran 7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan

Provinsi:

Tahun:

No	Kabupaten	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Miskin (Total)	Persentase KK Miskin	Bobot	Sumber Data yg Digunakan
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (6/3) x 100%	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
Jumlah								

Keterangan: Kolom 8

Persentase (r)

(%)

r < 20

20 ≤ r < 40

≥ 40

Bobot

1

2

3

Warna

Hijau

Kuning

Merah

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas

.....

Lampiran 8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan

Provinsi :

Bulan : Tahun

No	Kabupaten	Jumlah Balita	Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	% KEP	Bobot KEP
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	Jumlah					

Keterangan:

Bobot

- 1 r < 15
- 2 15 ≤ r ≤ 20
- 3 > 20

Warna

- Hijau
- Kuning
- Merah

....., 2010

Sekretariat Pokja

Petugas